



Analisis Perlindungan Hukum Pada Anak Dalam Prespektif Hak Terhadap Manusia

Faturohman¹, Nana supriatna², Winda Putri Julianah³

arturcikaseban@gmail.com¹; snana0586@gmail.com², winda Putri Julianah@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRACT

Legal protection for children is a very crucial aspect in efforts to ensure the fulfillment of human rights, especially for children. Children are immature people and must be protected as strictly as possible. The implementation of this legal protection still faces various challenges, including a lack of awareness among the public regarding their rights and also the existence of a culture that can sometimes conflict with the principles of human rights. This more integrated and sustainable effort from various parties, including the government and the general public, can protect a right that is carried out effectively. Education and public awareness regarding important things to protect children's rights, such as improving an environment that can develop and also the overall welfare of children.

Keywords: Protection, rights, implementation

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak ini ialah suatu aspek yang sangat krusial dalam upaya guna menjamin terpenuhinya suatu hak terhadap manusia. Adanya upaya yang lebih terpadu ini dan juga adanya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk suatu pemerintah dan juga masyarakat umum yang dapat melindungi suatu hak yang dilakukan secara efektif. Adanya suatu kerangka pada hukum yang sangat memadai, ini juga dapat diperlukan guna peningkatan suatu dalam berbagai aspek implementasi dan juga adanya penegakkan hukum guna mencapai perlindungan pada hak. Pendidikan dan juga penyadaran akan masyarakat mengenai suatu hal yang penting guna melindungi suatu hak yang dilakukan oleh anak, seperti guna ditingkatkan suatu lingkungan yang dapat berkembang dan juga kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci : Perlindungan, hak, implementasi

PENDAHULUAN

Anak ialah seseorang yang telah dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun tidak melakukan suatu pernikahan tetap dikatakan anak. Anak-anak ialah sekelompok yang rentan dalam masyarakat dan juga memerlukan suatu perlindungan yang khusus, karena ketidakmampuan mereka untuk melindungi dirinya sendiri dan haknya. Perlindungan hukum terhadap anak ialah bagian yang integral dari upaya guna memastikan bahwa hak anak dapat dihormati dan juga dipenuhi.

Adanya perlindungan hukum terhadap anak ini, semakin penting dikarenakan anak memiliki hak yang fundamental yang harus dijaga oleh negara, keluarga dan juga masyarakat. Konvensi hak anak yang telah diadopsi oleh PBB, pada tahun 1989 ini menegaskan pentingnya suatu perlindungan pada hak anak. Konvensi ini sudah mengatur tentang berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang dan lain sebagainya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan melalui keputusan dari suatu presiden yang

menunjukkan komitmen antar suatu negara, yang bertujuan guna melindungi hak terhadap anak.

Indonesia memiliki berbagai perundang-undangan dan juga peraturan yang bertujuan guna merancang dan juga melindungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Perlindungan hak terhadap anak di Indonesia, ini perlu menghadapi berbagai suatu tantangan yang kompleks dan juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ada beberapa tantangan utama, dalam perlindungan hak pada anak di Indonesia, ialah :

1. Anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pekerja anak, eksploitasi seksual komersial, dan juga Adaya perdagangan anak.
2. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu perlindungan terhadap hak anak masih rendah.
3. Keterbatasan akan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun dari suatu tenaga profesional yang terlatih, menghambat upaya perlindungan anak
4. Ada beberapa peraturan hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak atau tidak cukup ketat untuk mencegah pelanggaran hak anak.
5. Budaya patriarki dan norma-norma sosial yang tidak mendukung hak anak juga menjadi tantangan.
6. Anak-anak sering sekali menjadi korban yang paling rentan dalam situasi bencana alam dan konflik sosial
7. Masalah kesehatan seperti gizi buruk dan juga tingginya angka kematian bayi dan balita ini dapat menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai belum terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.

Yang pasti, jika adanya suatu tantangan yang di hadapi di Negara Indonesia, pastinya pemerintah tidak ambil diam dalam kasus ini. Ada upaya yang dilakukan pemerintah, dalam mengatasi suatu tantangan terhadap hak yang dimiliki oleh anak ini, ialah :

1. Meningkatkan suatu edukasi dan juga kesadaran akan masyarakat, ialah dengan melakukan suatu kegiatan seperti kampanye public, dan juga pelatihan ini dapat menekankan pentingnya suatu perlindungan bagi anak
2. Adanya penguatan kerangka akan hukum, ialah dengan menyusun dan juga mengimplementasikan suatu peraturan yang sudah ditetapkan dan juga dijalankan dengan sekuat mungkin, yang berkaitan dengan perlindungan pada hak anak dan juga memastikan guna penegakkan hukum yang sangat konsisten.

3. Melakukan peningkatan akan sumber daya, ialah dengan mengalokasikan suatu anggaran yang sangat memadai dan juga adanya suatu pelatihan terhadap tenaga professional di bidang perlindungan anak
4. Melakukan koordinasi antar lembaga, ialah dengan cara memperbaiki koordinasi antar lembaga-lembaga seperti pemerintah dan non-pemerintah, ini untuk memastikan adanya suatu pelaksanaan terhadap suatu kebijakan perlindungan anak yang efektif.
5. Akses terhadap suatu layanan, yang dimana guna memperluas akses anak ini terhadap layanan pendidikan terutama di daerah yang terpencil
6. Adanya perlindungan dalam keadaan darurat, ialah guna meningkatkan akan kesiapan dan juga respons terhadap kebutuhan anak dalam situasi bencana maupun konflik.

Hak yang dimiliki oleh anak yang harus dilindungi, ini dapat mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan suatu perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ada beberapa hak anak yang utama, yang perlu dilindungi, ialah :

1. Setiap anak berhak untuk hidup dan juga mempertahankan hidupnya
2. Anak berhak atas suatu identitas yang harus dimilikinya, termasuk nama, kewarganegaraan, dan pengakuan status hukum yang memastikan hak-hak sipilnya terlindungi.
3. Anak berhak mendapatkan suatu layanan kesehatan yang sangat memadai, termasuk adanya imunisasi, perawatan medis, dan nutrisi yang baik untuk memastikan tumbuh kembang yang sehat.
4. Anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual, serta eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk perdagangan anak dan pekerja anak.
5. Anak berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, sesuai dengan usia dan kematangan mereka
6. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai jika mereka berhadapan dengan hukum, termasuk hak atas pengadilan yang seadil mungkin.
7. Anak berhak untuk bermain dan juga beristirahat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni yang mendukung perkembangan mereka.

8. Anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan sosial yang memadai, termasuk bantuan dan dukungan dalam keadaan miskin, yatim piatu, atau terlantar.
9. Anak berhak atas privasi dan perlindungan dari adanya gangguan yang tidak sah terhadap suatu kehidupannya, baik antar pribadi, keluarga, rumah, ataupun korespondensi mereka.
10. Anak berhak, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan bermanfaat bagi perkembangannya pada mereka, termasuk informasi yang mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang dapat menjadi penghalang utama dalam upaya perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak?
2. Bagaimana efektivitas implementasi pada perundang-undangan dalam melindungi hak?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum deskriptif yuridis, ialah penelitian yang membahas tentang suatu fenomena atau gambaran yang nyata yang sesuai dengan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Faktor yang dapat menghalangi perlindungan pada anak

Perlindungan ialah sesuatu yang dapat meliputi segala kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari suatu tindakan yang dapat membahayakan anak secara fisik maupun psikis. Ada beberapa faktor yang sering sekali, menjadi penghalang utama dalam perlindungan hak terhadap anak, ialah :

1. Kurangnya pemahaman dan juga kesadaran, ialah masih banyak orang tua dan juga anggota masyarakat yang kurang memahami akan hak yang dimiliki oleh anak secara menyeluruh.
2. Kemiskinan, ialah suatu kondisi ekonomi yang sangat buruk ini sering kali membuat keluarga menjadi kesulitan guna memenuhi kebutuhannya dasar anak, seperti pendidikan.
3. Akses yang sangat terbatas ke layanan dan juga fasilitas, ialah ada beberapa daerah terutama pedesaan atau daerah yang terpencil, ialah akses ke layanan terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak sangat terbatas

4. Adanya kekerasan dan juga eksploitasi, ialah seorang anak sering sekali menjadi korban kejahatan.
5. Adanya kebijakan dan juga peraturan yang tidak memadai, ialah ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang melindungi hak pada anak ini masih lemah.
6. Adanya budaya dan juga praktik tradisional, ialah adanya beberapa praktik budaya atau tradisional dapat bertentangan dengan hak-hak anak.
7. Kurangnya partisipasi pada anak, ialah anak ini sering sekali terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.
8. Adanya konflik dan juga situasi yang darurat, ialah anak yang ada di daerah konflik atau yang terkena bencana alam ini, sering sekali menghadapi risiko yang lebih besar terhadap hak-hak mereka.
9. Adanya ketidaksetaraan pada gender, ialah anak perempuan ini sering sekali menghadapi suatu diskriminasi dan juga kekerasan yang berbasis gender yang dapat menghalangi suatu akses mereka ke pendidikan, kesehatan, dan juga partisipasi sosial.

Efektivitas Implementasi perundang-undangan

Adanya efektivitas implementasi perundang-undangan dalam melindungi anak di lapangan, ini sering sekali menghadapi berbagai tantangan. Ada beberapa aspek, serta faktor yang dapat meningkatkan atau menghambat pelaksanaan ialah :

1. Adanya pengetahuan dan juga kesadaran hukum, ada faktor positifnya ialah adanya suatu pelatihan dan juga adanya kegiatan sosialisasi tentang hak yang dimiliki oleh anak dan juga adanya suatu peraturan yang ada kepada masyarakat.
2. Penegakkan hukum yang sangat konsisten ini ialah adanya faktor yang positif berupa sistem peradilan yang responsive dan juga transparan serta adanya dukungan dari lembaga perlindungan anak.
3. Sumber daya yang sangat memadai, ada beberapa faktor positifnya ialah adanya alokasi sebuah anggaran yang sangat memadai guna layanan perlindungan akan anak, termasuk penyediaan tempat perlindungan.
4. Koordinasi antar lembaga, ialah faktor positifnya berupa suatu Kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga yang terkait dalam menyelesaikan kasus ini,
5. Ikut berpartisipasi pada komunitas dan juga masyarakat, ini memiliki dampak yang positif ialah keterlibatan yang sangat aktif dari komunitas lokal maupun keluarga dalam mendukung perlindungan pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

6. Melakukan pemantauan dan juga evaluasi, ialah faktor positifnya adanya sistem pemantauan yang sangat efektif untuk mengevaluasi penerapan hukum dan juga suatu program dalam perlindungan anak, serta adanya mekanisme feedback untuk perbaikan berkelanjutan
7. Adanya budaya dan juga praktik sosial, ialah ada faktor positif seperti suatu adopsi dan juga adanya penerapan norma sosial yang dapat mendukung perlindungan hak yang dimiliki oleh anak
8. Melakukan perlindungan yang spesifik dalam situasi khusus, ialah memiliki faktor yang positif guna perlindungan yang dapat dikaitkan dengan situasi darurat seperti bencana alam.

Untuk meningkatkan efektivitas terhadap implementasi perundang-undangan dalam melindungi hak anak, ini dapat diperlukan suatu pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Adapun, langkah-langkah yang dapat diambil, ialah :

1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum, yang dimana di dalam kalangan masyarakat dan profesional.
2. Memperkuat sistem penegakan hukum, ini dilakukan dengan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan sumber daya.
3. Mengalokasikan sumber daya yang sangat memadai, ini dapat memiliki tujuan untuk layanan perlindungan anak.
4. Mendorong partisipasi komunitas dan keluarga, dalam upaya perlindungan anak.
5. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif, ialah untuk terus mengukur dan memperbaiki upaya perlindungan anak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum pada anak dalam perspektif hak terhadap setiap manusia ini merupakan hak yang dapat dijamin, yang sesuai dengan standar internasional hak pada manusia. Hak anak dianggap sebagai hak terhadap manusia yang universal, yang harus dihormati dan juga dilindungi tanpa adanya suatu diskriminasi yang berdasarkan ras, agama, dan juga jenis kelamin. Perlindungan hukum anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak, seperti hak atas hidup, hak untuk berkembang, dan suatu kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Indonesia telah meratifikasi konvensi pada hak yang dimiliki oleh anak, ini merupakan suatu landasan utama dalam membangun kerangka hukum perlindungan anak yang komprehensif. Pentingnya untuk melibatkan anak-anak dalam suatu pengambilan

keputusan yang dapat mempengaruhi mereka sendiri, sejalan dengan prinsip-prinsip hak partisipasi, ini bertujuan untuk membantu membangun suatu rasa yang memiliki dan memberdayakan anak untuk menyuarakan pendapat mereka. Adanya suatu peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan anak-anak sendiri, tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum adalah kunci untuk memperkuat perlindungan anak.

Sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat ini, diperlukan untuk memantau pelaksanaan perundang-undangan yang dapat diidentifikasi di arena mana saja yang dapat diperbaiki. Adanya faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang utama dalam upaya perlindungan terhadap hak anak, ialah :

1. Banyak orang tua, masyarakat, dan bahkan ada beberapa pihak yang berkepentingan tidak memahami secara menyeluruh mengenai hak-hak anak
2. Keadaan ekonomi yang buruk dapat mengakibatkan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi.
3. Diskriminasi gender sering kali mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap anak perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan.
4. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kerja paksa.
5. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak mungkin terbatas.

Efektivitas terhadap implementasi pada perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak di lapangan dapat dievaluasi dari beberapa sudut pandang untuk mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif. Implementasi yang efektif ini, memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi keuangan, personel, maupun infrastruktur. Adanya suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan, termasuk petugas penegak hukum, dan orang tua, penting untuk memahami hak-hak anak dan tata cara penanganannya.

Adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat dan teratur diperlukan untuk memonitor suatu implementasi yang ada di perundang-undangan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi perundang-undangan dalam melindungi anak di lapangan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, perubahan kebijakan yang mendukung, serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Ada beberapa upaya utama, yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi anak, ialah :

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan perundang-undangan, yang membahas tentang perlindungan pada anak, yang dapat memberikan suatu landasan yang kuat untuk melindunginya.

1. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan nasional yang mengatur berbagai aspek suatu perlindungan anak, termasuk adanya pemberantasan pekerja anak, suatu perlindungan pada anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual, pengentasan kemiskinan anak, serta hak-hak khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus.
2. Pemerintah terus mengembangkan sistem perlindungan anak yang meliputi layanan sosial, dan lain sebagainya.
3. Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana
4. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, yang bertujuan untuk melindungi hak.

Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pada pemerintah Indonesia untuk mengawasi akan hak pada manusia, serta guna memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan juga dapat berkembang secara nyaman. Perlindungan pada hak yang ada di Indonesia ini memiliki dampak, ialah :

1. Perlindungan hak anak berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan anak.
2. Upaya perlindungan terhadap anak dapat membantu mengurangi kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak.
3. Perlindungan hak anak berdampak positif pada akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas.
4. Perlindungan hak terhadap anak juga berarti memberdayakan anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara
5. Investasi dalam perlindungan hak anak merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia

DAFTAR PUSTAKA

Lesmana, A. 2012. Definisi Anak. Tersedia di: <http://andibooks.wordpress.com>. Diakses tanggal 7 April 2018.

Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan pada hak yang dimiliki oleh anak.